



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUGENG NUGROHO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 428398

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.115.000.000
1. Tanah Seluas 1835 m ² di KAB / KOTA WONOGIRI, LAINNYA Rp. 205.000.000		
2. Tanah Seluas 2206 m ² di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m ² /160 m ² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 7600 m ² /6400 m ² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	144.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 1PA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SE88 MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
3. MOBIL, SUZUKI AVI414F DX 4X2 M /T-MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.537.800
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.409.086
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.334.946.886
III. HUTANG	Rp.	24.750.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.310.196.886



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.